

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Tidak Mungkin Bisa Digelar

Komisi E Desak Pemprov Tarik Seluruh Uang Panjar Formula E

JAKARTA-Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menegaskan pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menarik seluruh commitment fee Formula E yang telah dibayarkan. Hal tersebut diungkapkan pada rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E di Jakarta.

"Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana. Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orangtua kita langsung dikasih," ucap Iman di Jakarta, Kamis (18/6/2020). Menurutnya, komisi E menyarankan agar Jakpro memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Dispora dan Jakpro mengaku akan mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut. "Pelajari dulu MoUnya, terus denda atau apa. Dia akan mencoba iya kan, tapi kita minta mereka pelajari dulu ini masih possible enggak untuk dilanjutkan," kata dia. Bila commitment fee ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan atau atas izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tentunya dengan seizin gubernur kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya



Tentunya dengan seizin gubernur kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya ekonominya impossible lah dalam kondisi kayak begini."

Iman Satria
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta

ekonominya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan pak gubernur. Karena keputusannya itu kan di pak gub bukan jakpro," tuturnya.

Pemprov DKI sudah membayar commitment fee mencapai 31 juta poundsterling. Biaya komitmen Formula E tersebut membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Bayar GBP 88 Juta

Iman Satria menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membayar 22 juta poundsterling saat ini. Pembayaran akan ditambah 10 persen pada tahun berikutnya. "Dari 20 juta (poundsterling) ke 22 juta, ke 24 juta, dan seterusnya. Artinya, kalau lima tahun kita masih harus bayar 88 juta poundsterling," kata Iman.

Menurut Iman, jika commitment fee tak ditarik tahun ini, Pemprov DKI wajib membayar biaya lanjutan selama lima tahun. Dia mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengambil sikap. Iman menyebut dana

itu akan lebih bermanfaat digunakan menangani COVID-19. Peralannya, ketika pandemi selesai, pergerakan ekonomi baru dimulai.

"Alangkah sayangnya kalau kita harus memikirkan untuk membayar Formula E yang notabene, ini belum tentu orang juga mau datang karena COVID-19," tambah dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak memiliki kemauan politik (political will) menarik kembali commitment fee Formula E. Padahal, saat ini masih masa pandemi COVID-19.

Wakil Ketua Komisi E, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai tatanan normal baru akibat pandemi COVID-19 dapat berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Dengan demikian, akan sulit mendatangkan penonton, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Penyelenggaraan Formula E tidak akan membawa keuntungan bagi Jakarta, sementara beban biaya commitment fee bertambah 10 persen dari tahun ke tahun," kata dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Tidak Mungkin Bisa Digelar

Tinggal Perintah

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra menyebut penarikan uang commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar atau 31 juta poundsterling tinggal menunggu perintah dan arahan Gubernur Anies Baswedan.

Pasalnya dalam rapat yang digelar bersama Komisi E, bersama pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Pemuda dan Olahraga, Selasa (16/6/2020), kedua pihak mengaku masih menunggu arahan sang gubernur. Tapi Anggara menduga Anies tidak punya kemauan politik, sehingga enggan menarik dana tersebut kembali ke pangkuan Pemprov. "Di dalam rapat, pihak Jakpro maupun Dispora mengaku belum mendapatkan arahan dari Pak Gubernur. Dari situ saya menangkap bahwa tampaknya Pak Gubernur tidak ada keinginan untuk menarik uang tersebut," kata Anggara kepada wartawan, Kamis (18/6/2020).

Padahal menurut anggota fraksi PSI ini, tatanan normal baru pasca pandemi Covid-19 bisa berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Menarik pengunjung untuk menyaksikan balap mobil listrik itu dianggap sulit dilakukan, apalagi jika targetnya adalah wisatawan mancanegara.

Dengan demikian ia mengira penyelenggaraan Formula E tidak akan membawa untung bagi Jakarta. Mengingat pula, beban biaya commitment fee bertambah 10 persen untuk setiap tahunnya.

Penarikan uang ratusan miliar itu juga dimungkinkan untuk dilakukan. Lantaran kondisi pandemi Covid-19

yang melanda banyak negara bisa digolongkan force majeure, alias kondisi di mana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena sengaja atau lalai, tapi karena ada hal di luar kemampuan.

"Penarikan uang commitment fee dimungkinkan karena ada force majeure berupa darurat bencana pandemi Covid-19. Pihak Dispora dan Jakpro sedang menunggu perintah dari Pak Gubernur," pungkasnya.

Lanjut ke Banggar

Sebelumnya Komisi E DPRD DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk membawa persoalan ajang balap mobil listrik Formula E terkait biaya komitmen (commitment fee) dan kepastian kelangsungan balapan tersebut ke rapat Badan Anggaran (Banggar).

Pasalnya, saat ini Formula E yang sejatinya berlangsung tanggal 6 Juni 2020 dibatalkan menyusul paparan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), padahal commitment fee yang telah disetorkan oleh Pemprov DKI Jakarta mencapai 31 juta pound sterling.

Terkait dengan fee tersebut, kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria di Jakarta, Selasa, menyebut dalam rapat bersama Jakarta Propertindo (Jakpro) dan SKPD terkait tersebut, para anggota Komisi E sepakat untuk dilakukan penarikan kembali dana tersebut yang membutuhkan sinergi antar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"Kami rekomendasikan kepada pimpinan dewan supaya menggelar Banggar memanggil TAPD, termasuk BPKD. Kalau memang bisa diselesaikan

di sana, nanti bisa selesai, tapi kalau memang harus sampai kepada gubernur akan kami tanyakan," kata Iman.

Ke depannya, Komisi E akan mengundang lagi SKPD terkait bahkan hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyampaikan pendapatnya pada rapat Banggar. "Kami kan punya hak untuk bertanya kepada gubernur, jadi bisa saja (memanggil). Kemudian hasil Banggar nanti juga bisa disampaikan kepada gubernur karena perwakilan (SKPD) dia kan pasti datang," ujar Iman.

Dirinya tak menampik, saat rapat kerja tadi hampir semua anggota dewan yang hadir dari berbagai fraksi meminta DKI menghentikan ajang balap itu, bukan hanya menundanya. Di sisi lain, PT Jakpro diketahui setelah berkoordinasi dengan FEO sepakat ajang balap Formula E tahun 2020 ditunda pada 2021 mendatang di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

"Kalau keinginan hati yah dibatalkan, tapi kan kami harus mempelajari dulu konsekuensi dalam perjanjian itu (antara DKI dengan FEO). Makanya kami minta evaluasi, nanti saat paparan sikapnya harus gimana," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Iman mengibaratkan ajang balap Formula E di tengah COVID-19 saat ini seperti 'kejepit'. Artinya sikap DKI terhadap ajang balap ini berada di posisi yang sulit. "Kita (DKI) kan sudah bayar tapi kalau tetap dilaksanakan dalam situasi perekonomian dua-tiga tahun ini belum tentu bagus. Ujungnya, pemerintah bayar (biaya komitmen) tapi tidak ada return (dampak bagi Jakarta) dan investasi kan celaka juga," ucapnya. (dni/ant)